

BIODATA PENULIS



Stevie Kaligis, SE., Ak., MM., CA, adalah Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado pada program studi Sarjana Terapan Akuntansi, Akuntansi Keuangan. Penulis menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Sam Ratulangi Manado, dan S2 di Magister Manajemen Program Kekhususan Akuntansi Pemerintahan, Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).



Sintia N. Korompis, SE., MSA, adalah Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado pada program studi Sarjana Terapan Akuntansi. Jenjang pendidikan tinggi yang ditempuh yaitu Pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado dan S2 di Program Studi Magister Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. Mata kuliah yang diampu adalah Audit internal dan Praktek, Akuntansi Pemerintahan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan Laboratorium Akuntansi Pemerintahan



Christony Maradesa, SE., MSA., Ak, Lahir di Manado, pada tanggal 11 Mei 1988. Jenjang pendidikan tinggi yang di tempuh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT, lulus Tahun 2009, kemudian melanjutkan studi di Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT dan lulus Tahun 2012. Sejak 2019 menjadi Dosen di Politeknik Negeri Manado dan mengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintah Daerah, Dasar Akuntansi dan Praktek, serta Sistem Informasi Akuntansi.



PENERBIT : POLIMDO PRESS
JALAN RAYA POLITEKNIK, KELURAHAN BUHA,
KECAMATAN MAPANGET MANADO - SULUT.

ISBN 978-623-7580-30-0



Stevie Kaligis
Christony Maradesa

KONSEP DAN APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2020

KONSEP DAN APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Stevie Kaligis, SE., MM., Ak., CA
Sintia N. Korompis, SE., MSA
Christony Maradesa, SE., MSA., Ak



Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Pemerintah Daerah

**Stevie Kaligis, SE.,MM.,Ak.,CA
Sintia Korompis, SE.,MSA
Christony Maradesa, SE.,MSA.,Ak**

Penerbit POLIMDO PRESS



KONSEP DAN APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Hak Cipta © Stevie Kaligis, SE.,MM.,Ak.,CA

© Sintia N. Korompis, SE.,MSA

© Christony Maradesa, SE.,MSA.,Ak

Hak Penerbit Pada POLIMDO PRESS

Penerbit POLIMDO PRESS, Politeknik Negeri Manado
Jl. Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget
Manado - Sulawesi Utara, PO BOX 1256
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Basement Kantor Pusat Kampus Politeknik Negeri Manado
pusatpenjaminanmutu.polimdo@gmail.com
www.polimdo.ac.id

Cetakan Buku Pertama, November 2020

ISBN : 978-623-7580-30-0

viii ; 204 hal ; 15,5 x 23 cm

Setting & Layout : Joseph N. Tangon
Cover Design : Joseph N. Tangon

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumber.

Dicetak Oleh POLIMDO PRESS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Manfaat	3
E. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar	3
BAB 2 MENYUSUN JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	5
A. Jenis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPKD	5
1. Sistem Akuntansi SKPD	5
2. Sistem Akuntansi PPKD	8
B. Format dan Klasifikasi Laporan Realisasi Anggaran.....	10
C. Format Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	15
D. Format dan Klasifikasi Laporan Operasional (LO).....	16
E. Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	20
F. Format dan Klasifikasi Neraca.....	21
G. Format Laporan Arus Kas (LAK).....	25
H. Catatan atas Laporan Keuangan.....	30
I. Latihan Soal	34
J. Tes Formatif.....	34
K. Referensi.....	35

BAB 3 MENYAJIKAN SECARA KOMPREHENSIF PENYUSUNAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN PEMDA.....	37
A. Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah	37
1. Single Entry	37
2. Double Entry	38
3. Triple Entry	38
B. Siklus Akuntansi	38
C. Latihan Soal	41
D. Tes Formatif.....	41
E. Referensi.....	42
BAB 4 MENYUSUN PROSES AKUNTANSI SKPD	45
A. Kebijakan Akuntansi	45
1. Kebijakan Piutang.....	46
2. Kebijakan Persediaan	46
3. Kebijakan Aset Tetap	47
B. Data Dinas Kesehatan.....	51
1. Neraca Awal Dinas Kesehatan.....	51
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan	52
3. Dokumen Transaksi Dinas Kesehatan.....	53
C. Laporan Dinas Kesehatan	78
1. Jurnal Anggaran dan Saldo Awal.....	78
2. Jurnal Umum	79
3. Buku Besar.....	83
4. Neraca Saldo	102
5. Jurnal Penyesuaian	104
6. Neraca Saldo Disesuaikan.....	105
7. Neraca Lajur (<i>Worksheet</i>).....	108

8. Laporan Keuangan	111
D. Latihan Soal	118
E. Tes Formatif.....	118
F. Referensi.....	119
BAB 5 MENYUSUN PROSES AKUNTANSI PPKD	121
A. Data PPKD	122
1. Neraca Awal PPKD	122
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja PPKD	123
3. Transaksi PPKD	125
B. Laporan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).....	127
1. Jurnal Anggaran dan Saldo Awal.....	127
2. Jurnal Umum	128
3. Buku Besar.....	132
4. Neraca Saldo	148
5. Jurnal Penyesuaian	150
6. Neraca Saldo Disesuaikan.....	151
7. Neraca Lajur (<i>Woksheet</i>)	153
8. Laporan Keuangan	155
C. Latihan Soal	166
D. Tes Formatif.....	166
E. Referensi.....	168
BAB 6 MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.....	169
A. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian	169
B. Laporan Konsolidasi Pemda	171
1. Neraca Lajur LRA	171
2. Neraca Lajur Laporan Operasional.....	173

3. Laporan Eliminasi	175
4. Neraca Lajur Penggabungan.....	176
5. Laporan Keuangan	179
C. Latihan Soal	189
D. Tes Formatif.....	189
E. Referensi.....	190
DAFTAR PUSTAKA.....	191
GLOSARIUM	193
INDEKS	203

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi ini, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal itu tentu saja harus sejalan dengan pelaporan keuangan yang mampu menyediakan informasi-informasi yang relevan. Pengelolaan keuangan daerah sebenarnya sudah ada sejak era pra-reformasi yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Sistem yang digunakan sebelum masa reformasi yaitu hanya sebatas sistem pencatatan sederhana berupa sistem tata buku tunggal dan menggunakan dasar pencatatan kas (*cash basic*) yang masih banyak memiliki kelemahan. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan-perubahan mendasar yang terjadi pada tata kelola keuangan daerah. Pasca reformasi terjadi pergeseran pengelolaan APBD, salah satunya dengan munculnya sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang kemudian menggantikan sistem pembukuan tunggal yang berjalan selama pra reformasi. Selanjutnya di era reformasi lanjutan, munculah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan amanat undang-undang yang terbaru. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan resmi dikeluarkan oleh KSAP. Perubahan paling akhir adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua yang akhirnya menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Melalui penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, lengkap dan informatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kinerja pemerintah dapat dievaluasi oleh semua pihak sehingga tujuan utama mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Untuk itu diperlukan referensi-referensi pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan daerah sehingga mereka yang ingin memahami secara mendalam dapat dengan mudah memperoleh pemahaman dari berbagai macam sumber. Buku ajar ini menampilkan prosedur pelaporan keuangan mulai dari dokumen pelaksana anggaran, contoh-contoh transaksi SKPD dan PPKD, dan kertas kerja sampai pada pelaporan keuangan konsolidasi. Dengan begitu mahasiswa tentunya dapat menggunakan buku ajar ini sebagai bahan praktek dan latihan-latihan dalam memahami Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Tujuan buku ajar ini adalah dengan memberikan referensi mengenai sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah. Selain itu digunakan sebagai bahan praktek dalam melatih mahasiswa sehingga membuat langkah-langkah dan proses sebuah transaksi pemerintah daerah sampai menjadi laporan keuangan.

C. Ruang Lingkup

Buku ajar ini berisi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemahaman secara teknis lebih khusus pada pelaporan keuangan SKPD dan PPKD sampai menjadi laporan keuangan konsolidasi. Dimulai dari pemahaman akan jenis dan bentuk

laporan keuangan pemerintah daerah dan dilanjutkan pada praktek berupa contoh transaksi, analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, dan kemudian penyusunan laporan keuangan.

D. Manfaat

Buku ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis transaksi keuangan pemerintah daerah baik SKPD maupun PPKD dan memprosesnya sampai menjadi laporan keuangan.

E. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar

Bacalah terlebih dahulu pendahuluan, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, manfaat, petunjuk penggunaan buku, setelah itu baca dan pahami jenis dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dan kemudian pahami serta analisis contoh-contoh transaksi keuangan pemerintah daerah. Terakhir, kerjakan kertas kerja yang terlampir sampai pada laporan keuangan konsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erlina dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat
- Kaligis, Stevie dan Kiet Tumiwa. (2017). Akuntansi Pemerintah Daerah. Manado: Polimdo Press
- Mutia, Yesi, Desmiyawati, dan Nur Azlina (2019). Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Tanjung, Abdul. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua untuk SKPD. Bandung: Alfabeta
- Tanjung, Abdul. (2014). Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua Pendekatan Teknis Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010

Literatur

- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. (2014). "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah." Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Modul dipresentasikan pada Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 di Jakarta.
[Http://keuda.kemendagri.go.id](http://keuda.kemendagri.go.id)

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Permendagri No. 64 Tahun 2013.